EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Wilayah Sulawesi)

Anggun Geovanny Rahman[1], Sri Indriyani S Dai[2] & Ivan Rahmat Santoso[3*]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo,
Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Indonesia
*e-mail : ivan_santoso@ung.ac.id

Artikel Info

Received :
15 January 2022
Revised :
12 November 2022
Accepted :
25 November 2022

Kata Kunci :
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi.

Keywords :
Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth.

ABSTRAK

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyai peran penting sebagai dana utama dalam upaya mendukung pembiayaan belanja daerah, namun pertumbuhan ekonomi Sulawesi saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, untuk itu studi investigasi pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Transfer (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan Variabel Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi, artinya Dana Bagi Hasil dapat menurunkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi, artinya Dana Alokasi Umum dapat meningkatkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi, artinya Dana Alokasi Khusus dapat menurunkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh 72 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi.

The Effect of Transfer Funds on Growth Economics (Sulawesi Regional Study)

ABSTRACT

Transfer funds from the central government to regional governments have an important role as the main fund in efforts to support regional expenditure financing, but Sulawesi's current economic growth has not shown maximum results, for this reason an investigative study of the effect of transfer funds on economic growth is crucial. This study aims to determine the effect of transfer funds (Profit Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds) on Sulawesi's economic growth. The data used is

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

sourced from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The method used is quantitative with panel data analysis. The results of this study indicate that the Profit-Sharing Fund variable has a significant negative effect on Sulawesi's economic growth, meaning that the Profit-Sharing Fund can significantly reduce the percentage of economic growth. The General Allocation Fund variable has a positive and significant impact on Sulawesi's economic growth, meaning that the General Allocation Fund can significantly increase the percentage of economic growth. The Special Allocation Fund variable has a significant negative impact on Sulawesi's economic growth, meaning that the Special Allocation Fund can significantly reduce the percentage of economic growth. The variables of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds have an influence of 72 percent on Sulawesi's economic growth.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 33 Tahun 2004. Sistem dan mekanisme pengelolaannya berubah. Di semua bidang, pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Selain otonomi daerah, ada juga desentralisasi, baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi, dan perencanaan lainnya, semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah (Christia & Ispriyarso, 2019; Rahayu & Febriaty, 2021). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun pedoman penggunaan dana perimbangan transfer dan pendapatan daerah atau sumber pendapatan daerah yang sah.

Pembayaran transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah, dan akan ditampilkan dalam perhitungan APBD nanti. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran antar pemerintah dan memastikan bahwa semua daerah memenuhi standar pelayanan publik minimum (Harahap et al., 2021). Dana transfer desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)**.** Dalam beberapa tahun berjalan dari tahun 2015- 2020, proporsi dana perimbangan se Sulawesi terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi dibandingkan penerimaan yang lain.

Dilihat pada Gambar 1, pada tahun 2015 total transfer dana yang diterima se Sulawesi sebesar Rp 56.663.894.725.843; tahun 2016 sebesar Rp 76.183.611.258.030; pada tahun 2017 sebesar Rp 79.146.701.431.448; tahun 2018 sebesar Rp 81.864.103.052.256; pada tahun 2019 sebesar Rp 85.478.018.351.192 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 86.158.144.909.891. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketergantungan di berbagai provinsi se Sulawesi terhadap transfer dana dari pusat masih cukup tinggi. Ketergantungan seperti ini harus diminimalisir agar pelaksanaan desentralisasi dapat benar-benar terwujud.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

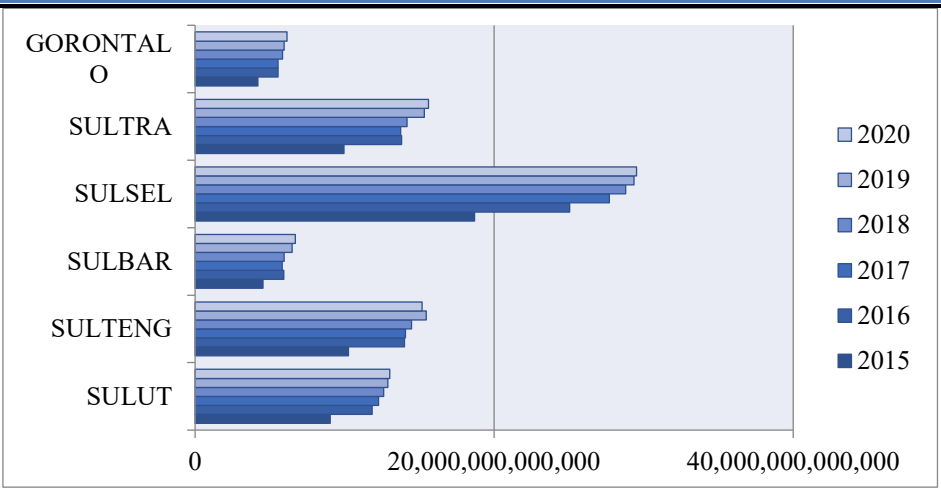

Sumber : Portal Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 1. Total Dana Transfer se Sulawesi pada Tahun 2015-2020

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pengeluaran infrastruktur dan kegiatan produksi lainnya. Pengeluaran produktif yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum akan mendorong pembangunan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur mendorong Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan penting. Kemana- dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Saat pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan alokasi ke belanja modal melalui pembangunan infrastruktur, maka dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Khawarizmi et al., 2021). Karena dengan adanya infrastruktur yang baik maka akan mengundang minat para investor yang secara umum membantu menggiatkan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya tentu saja membuka berbagai lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran (Sahi et al., 2020). Belanja modal merupakan salah satu komponen yang dapat di andalkan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Sebab, dengan semakin tingginya belanja modal maka akan semakin tinggi pula produktivitas ekonomi. Menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut Henry Gerungan (Gerungan et al., 2017) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Di era otonomi, setiap daerah berlomba-lomba mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerah (Djadjuli, 2018).

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

Kapasitas pertumbuhan suatu wilayah sangat bergantung pada berbagai faktor ekonomi, beberapa di antaranya saling mempengaruhi.

Melihat pertumbuhan ekonomi se Sulawesi akhir-akhir ini telah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada Provinsi Sulawesi Utara pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,99 persen; pada provinsi Sulawesi Tengah sebesar -0,65 persen; pada provinsi Sulawesi Barat sebesar -1,14 persen; pada provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 persen dan pada Se Sulawesi mengalami penurunan sebesar -0,02 persen tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan fenomena di atas perlunya untuk mengkaji lebih lanjut dana transfer yang akan dialokasikan di berbagai daerah se Sulawesi meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi se Sulawesi. Studi sebelumnya dari telah menganalisis dampak pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi yang diantaranya riset (Arina et al., 2019) (Manulusi et al., 2021) (Mamuka et al., 2019) (Ibrahim & Abdul, 2019) (Sari, 2017) dan (Ismail et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi se Sulawesi.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Mengingat penelitian ini bersifat kompleks dan kolektif serta estimasi waktu yang dimiliki oleh peneliti terbatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus lokasi penelitian hanya di beberapa provinsi se Sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Se Sulawesi.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang berupa laporan keuangan perusahaan dalam hal Perusahaan subsektor makanan dan minuman.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi kuantitatif dari website sesuai lingkup penelitian (Kabir, 2016). Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan website dari Kementerian Keuangan Indonesia Dan Badan Pusat Statistik.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data panel. Data diolah menggunakan *Eviews Portable 9.* Data Panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*). Dalam penelitian ini digunakan data terdiri atas 6 provinsi yaitu, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Se Sulawesi. Sehingga merupakan *polled the data* yaitu

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

gabungan antara data *time series* (tahun 2015-2019: 5 tahun) dengan data *cross section* 6 provinsi Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari estimasi model regresi dengan penggunaan data panel, regresi persamaan linear berganda.

Bentuk model dasarnya adalah sebagai berikut ini

$$PE_{it} = \beta 0 + \beta 1 DBH_{it} + \beta 2 DAU_{it} + \beta 3 DAK_{it} + \varepsilon_{it} \ldots . (1)$$

Di mana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)
DBH = Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
DAU = Pajak Daerah (Rp)
DAK = Belanja Langsung (Rp)
ε = *error terms*
t = Menunjukkan periode waktu t di mana periode waktunya adalah tahun 2015 – 2020
i = menunjukkan subjek di mana subjeknya adalah Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Teluk Tomini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari estimasi model regresi dan pemilihan data panel di atas, maka hasil analisis regresi data panel menggunakan model *Fixed Efek Model* (FEM). Output estimasi menggunakan FEM tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Output estimasi FEM

Variable	Coefficient		Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.042709		7.042709	0.846666	0.0000
DBH	-0.005504		-0.005504	0.001770	***0.0072
D(DAU)	0.001150		0.001150	0.000226	***0.0001
D(DAK)	-0.001814		-0.001814	0.000468	***0.0015
R-squared	0.721304		**F-statistic**		4.852772
Adjusted R-squared	0.572667		**Prob(F-statistic)**		0.004197

Sumber : Output Eviews 9
Keterangan: Taraf Sig : *** = 1%; ** = 5%; dan * = 10%.

Berdasarkan hasil *output* model FEM pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa:

1. Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi, hal ini berarti setiap penambahan 1% Dana Bagi Hasil maka nilai Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi akan menurun sebesar 0.005504.
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi, hal ini berarti setiap penambahan 1% Dana Bagi Hasil maka nilai Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi akan meningkatkan sebesar 0.001150.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi, hal ini berarti setiap penambahan 1% Dana Bagi Hasil maka nilai Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi akan menurun sebesar 0.001814.

Uji Hipotesis Statistik

Uji Hipotesis merupakan asumsi untuk menjawab sementara sebuah pertanyaan dan sering dituntut untuk melakukan pengecekan terhadap suatu hal. Dalam melakukan uji

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

hipotesis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau biasa disebut dengan taraf nyata (α), setiap melakukan uji hipotesis bisa benar atau salah. Dengan demikian melakukan uji hipotesis perlu diadakan pengujian sebelum hipotesis itu dapat diterima maupun ditolak, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel independen secara individu dapat menerangkan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa:

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi, karena nilai *Prob* dari Dana Bagi Hasil lebih kecil dari taraf Sig. (0.01) sehingga H_0 diterima.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi, karena nilai *Prob* dari Dana Alokasi Umum lebih kecil dari taraf Sig. (0.01) sehingga H_0 diterima.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi, karena nilai *Prob* dari Dana Alokasi Khusus lebih kecil dari taraf Sig. (0.01) sehingga H_0 diterima.

Uji Simultan (f)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan nilai *p-value* kurang dari nilai taraf signifikansi (α=0,01). Hal ini berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Uji Determinasi R^2

Koefisien determinasi atau yang biasa dinotasikan R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.3 nilai *R-squared* sebesar 0.721304. Hal ini berarti variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi Se Sulawesi sebesar 72%, sehingga dapat dikatakan bahwa 72% Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi mampu dijelaskan oleh model, sedangkan 28% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Uji Asumsi Klasik

Model yang baik juga harus sesuai dengan kriteria pengujian asumsi klasik, agar prediksi yang dihasilkan lebih baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas keduanya berdistribusi Normal atau tidak. Suatu model Regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

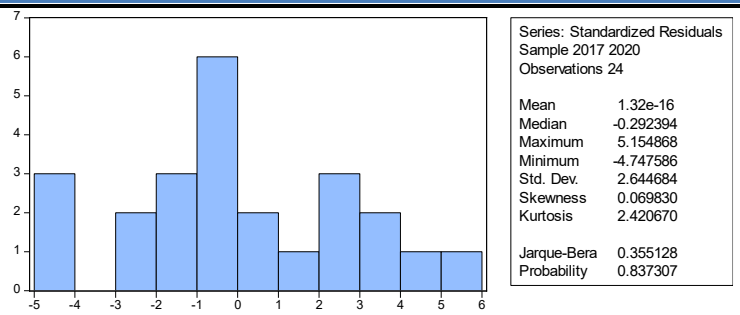

Sumber : Output Eviews 9

Gambar 2. Output Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2 di atas, nilai probabilitas *Jarque-Beta* hitung (0.84) lebih besar dari 0.01, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi **Normal.**

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas Bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi atau yang sempurna antar variabel independen yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

	DBH	D(DAU)	D(DAK)
DBH	1.000000	0.258687	0.260815
D(DAU)	0.258687	1.000000	0.39476
D(DAK)	0.260815	0.39476	1.000000

Sumber : Output Eviews 9

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antara variabel independen di bawah 0.80 dengan demikian data dalam penelitian ini **tidak terjadi masalah multikolinearitas.**

Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda dari suatu observasi observasi lain. Jika varians tidak berubah maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas (Ariefianto, 2019).

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.163680	0.662403	3.266411	0.0039
DBH	-6.22E-05	0.001174	-0.052943	**0.9583**
D(DAU)	3.70E-05	0.000287	0.129033	**0.8986**
D(DAK)	-0.000115	0.000633	-0.181685	**0.8577**

Sumber : Output Eviews 9

Berdasarkan tabel 3 di atas, nilai probabilitas semua variabel dependen lebih besar dari taraf Sig. (0.01) sehingga dapat disimpulkan **tidak terjadi heteroskedastisitas**.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.2 Desember 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122

Pembahasan

Setelah melakukan pengujian hipotesis dan estimasi pada model maka akan ditelaah secara lebih lanjut mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil dan Export terhadap pertumbuhan ekonomi Se Sulawesi. Di bawah ini merupakan hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi Se Sulawesi pada tahun 2016-2020.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi pada tahun 2016-2020.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah) DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari (2) dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan dana bagi hasil pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 3) Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari: 1) Kehutanan, 2) Pertambangan Umum, 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangan Gas Bumi dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi se sulawesi memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sehingga, jika Dana Bagi Hasil meningkat maka dapat menurunkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini menggambarkan Dana Bagi Hasil se sulawesi yang kurang fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan daerah-daerah yang di Sulawesi tidak sepenuhnya leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja dan secara keseluruhan DBH kurang berkontribusi untuk peningkatan daerahnya. Penelitian ini relevan dengan penelitian (Arina et al., 2019), yang menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota". 1. Dana alokasi umum untuk daerah propinsi, jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten/ kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah dana alokasi umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi daerah provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia. 2. Dana

alokasi umum untuk daerah kabupaten/ kota, jumlah dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten/ kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum seluruh daerah kabupaten/ kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi se Sulawesi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sehingga, jika Dana Alokasi Umum meningkat maka dapat meningkatkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dikatakan signifikan karena DAU memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin besar proporsi DAU yang diterima pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat maka semakin besar pula prospek pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pembiayaan guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini relevan dengan penelitian (Manulusi et al., 2021) dan (Mamuka et al., 2019) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se Sulawesi pada tahun 2016-2020.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah: Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Jadi, tidak semua daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis Dana Bagi Hasil atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain dalam. Berdasarkan hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi se sulawesi memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Sehingga, jika Dana alokasi Khusus meningkat maka dapat menurunkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Belum optimalnya dampak yang diberikan dari DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan kurang tepatnya pengalokasian dan kelemahan-kelemahan tata kelola implementasi DAK (Bappenas, 2011). Perencanaan dan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah dilakukan secara *top-down*, dimana daerah tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan program atau kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan DAK. Hal tersebut berakibat pada kemungkinan bahwa DAK tidak diarahkan pada program atau kegiatan-kegaitan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain (Amelia et al., 2021). Yang berarti tidak boleh disalahgunakan digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan. Pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus

mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat (Sengaji et al., 2019). Penelitian ini relevan dengan penelitian (Ibrahim & Abdul, 2019) (Sari, 2017) dan (Ismail et al., 2020) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menjabarkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se Sulawesi, artinya Dana Bagi Hasil di dapat menurunkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan; (2) Variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se Sulawesi, artinya Dana Alokasi Umum di dapat meningkatkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan; (3) Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se Sulawesi, artinya Dana Alokasi Khusus di dapat menurunkan presentasi pertumbuhan ekonomi secara signifikan; (4) Variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh 72 persen terhadap pertumbuhan ekonomi se sulawesi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan rekomendasi: (1) Sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan pada bidang-bidang pemeliharaan atau perbaikan infrastruktur utamanya pada daerah terpencil agar dapat menunjang aktivitas sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi; (2) Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi; (3) Sebaiknya pemerintah daerah lebih mengalokasikan dana dalam hal pelatihan kepada masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat akan lebih berkualitas dan efektif dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, F. A., Azwardi, A., & Sukanto, S. (2021). The Effect of Village Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds on Regional Inequality in the Regencies/Cities of South Sumatra Province. *Oblik i Finansi*, *4(94)*, 55–61. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-4(94)-55-61

Ariefianto, M. D. (2019). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews.* Jakarta :Erlangga.

Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *20*(3), 26–35. https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019

Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi (2015-2020)*.

Bappenas. (2011). *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK).*

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, *15*(1), 149–163. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8–21.

Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* *8*(1), 233–245. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427

Harahap, P., Erlina, & Sirojuzilam. (2021). The Effect of General Allocation Funds , Special Allocation Funds , Revenue Sharing Funds and Regional Expenditures on the Development of Districts / Cities of North Sumatra Province. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, *4*(4), 14179–14190. https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3525

Ibrahim, F. N. A., & Abdul, I. (2019). Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region. *Jambura Equilibrium Journal*, *1*(1), 38–46. https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000

Ismail, Y. R., Arham, M. A., & Dai, S. I. S. (2020). Analysis Of Village Dau, Dak, And Funds On Inequality Distribution Income And Growth In Indonesia 2015-2018. *Jambura Equilibrium Journal*, *1*(2), 83–93. https://doi.org/10.37479/jej.v1i2.4384

Kabir, S. M. S. (2016). Methods of data collection. In *Basic Guidelines for Research: An Introductory Approach for All Disciplines* (Vol. 14, Issue 2, pp. 201–275). Book Zone Publication, Chittagong-4203, Bangladesh. https://doi.org/10.1097/00006527-199406000-00014

Khawarizmi, M. A., Marseto, & Sishadiyati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Malang The Effect of Regional Original Income and Balancing Funds on Poverty with Regional Expenditures as Intervening. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *21*(2), 122–131. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v21i2.7618

Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *19*(03), 118–128.

Manulusi, M. R., Sinring, B., & Hasbi, A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(3), 533–541.

Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, *2*(1), 360–367. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284

Sahi, D. F., Arham, M. A., & Santoso, I. R. (2020). The Impact of Government Infrastructure Spending on Economic Growth and Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, *2*(1), 1–6. https://doi.org/10.37479/jej.v2i1.4494

Sari, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Global Journal*, *1*(1), 1745–1773. https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321

Sengaji, M., Sasongko, S., & Sakti, R. (2019). Determinant of Regional Economic Growth in East Java, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *11*(2), 104–115. https://doi.org/10.17977/um002v11i22019p104

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.